

ABSTRAK

Ratih Kamaratih Putri, 1218010166, 2025: “Strategi Pemerintah dalam Meminimalisir Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nonprosedural di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah pengaduan dan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural asal Provinsi Jawa Barat yang tercatat sebagai provinsi dengan pengaduan tertinggi di Indonesia. Permasalahan ini menunjukkan pentingnya pelaksanaan strategi dalam menangani dan meminimalisir PMI nonprosedural yang lebih efektif oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penempatan dan perlindungan PMI. Meskipun berbagai kebijakan dan program telah dijalankan, meningkatnya jumlah kasus PMI nonprosedural menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan masih belum berjalan secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah dalam meminimalisir Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat melalui strategi pemerintah yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan (2009) sebagai pisau analisis yang menilai strategi berdasarkan lima pengembangan strategi yang efektif, yaitu tujuan (*purposes*), lingkungan (*environment*), arahan (*directions*), tindakan (*actions*), dan pembelajaran (*learning*).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta diuji validitasnya melalui triangulasi data. Analisis data dilakukan dengan mengolah dan menyusun data, membaca data secara keseluruhan, melakukan *coding* seluruh data, mengimplementasikan proses *coding*, menyajikan hasil analisis data, dan membuat interpretasi.

Berdasarkan hasil penelitian, strategi dalam meminimalisir PMI nonprosedural oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat belum dilaksanakan secara optimal. Meskipun pemerintah telah memiliki arah kebijakan dan sistem perlindungan PMI, namun implementasinya belum efektif, khususnya dalam menghadapi rendahnya literasi masyarakat terhadap prosedur resmi, pengaruh calo, serta terbatasnya akses informasi dan pelatihan kerja. Selain itu, meningkatnya pengaduan dan fasilitasi PMI nonprosedural juga menandakan perlunya edukasi preventif dan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, strategi meminimalisir PMI nonprosedural perlu diarahkan pada penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pendekatan berbasis komunitas agar kebijakan dan program yang diterapkan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Strategi Pemerintah, Pekerja Migran Indonesia, Nonprosedural